

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deklarasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang disampaikan oleh Presiden RI ke-7 yaitu Joko Widodo di tahun 2019 menjadi topik yang sampai saat ini masih banyak diperbincangkan media di Indonesia. Keputusan tersebut mewarnai berbagai media di Indonesia dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Pro maupun kontra bermunculan dari banyaknya masyarakat di Indonesia mulai dari dukungan penuh hingga penentangan maupun penolakan dari gagasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Setelah melewati proses yang cukup panjang, pada awal tahun 2022 tepatnya di tanggal 18 Januari 2022 dalam sidang paripurna ke-15 DPR RI masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU).

Kabupaten Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur merupakan lokasi yang dipilih sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Sebelumnya, rencana ini sudah diizinkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta telah melewati serangkaian kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) (Ristawati, 2020). Dalam data Bappenas tercatat beberapa latar belakang pemindahan ibu kota negara itu sendiri, yaitu keinginan merubah orientasi pembangunan ekonomi dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris, persiapan rencana untuk mencapai visi masa keemasan Indonesia, pada tahun 2045, untuk menjadi negara maju, serta upaya pemulihan transformasi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Meskipun berbagai latar

belakang yang disampaikan jelas, tetapi tidak dipungkiri bahwa pemindahan ibu kota negara tetap memunculkan pro dan kontra.

Pasalnya, lokasi baru yang dipilih, yaitu Kalimantan, merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan hutan terbesar. Hal ini tentu dikhawatirkan akan mengancam dan merusak ekosistem hutan tersebut. Selain itu, para elite politik diduga terlibat dalam proyek besar ini yang tentunya sangat menarik di mata para investor asing untuk ikut terlibat di dalamnya. Migrasi secara besar akan terjadi dari ibu kota lama menuju yang baru sehingga membutuhkan biaya yang besar yang dapat berakibat pada defisitnya Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan dana lainnya.

Pemindahan ibu kota negara menjadi isu kontroversial yang terus bergulir. Perbedaan pandangan di masyarakat dan kalangan pejabat negara menimbulkan resiko besar terhadap kelancaran proyek ini. Mulai dari alokasi anggaran yang jumbo, kesiapan infrastruktur, hingga dampak sosial ekonomi terhadap Jakarta, menjadi pertimbangan krusial. Keputusan yang terkesan mendadak ini telah memicu berbagai kontroversi dan menjadi bahan pemberitaan hangat di berbagai media.

Gagasan pemindahan Ibukota Negara (IKN) sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Wacana ini pertama kali mencuat pada era Presiden Sukarno pada tahun 1957. Sukarno mengusulkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai calon ibu kota baru. Sebagai kota yang dibangun dari awal, Palangkaraya dianggap ideal karena letaknya yang strategis di tengah kepulauan Indonesia, jauh dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi. Pada tahun 1958, Sukarno bahkan meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah dengan visi bahwa

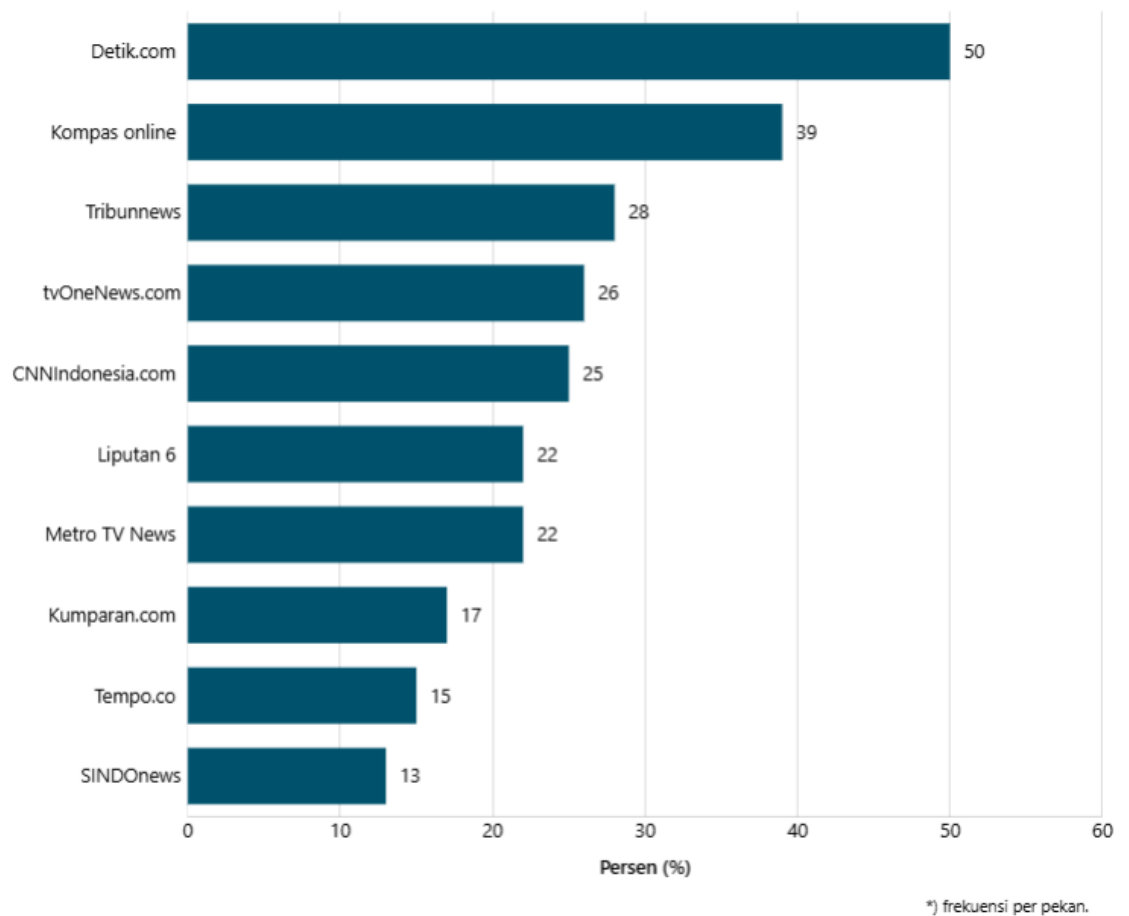
kota ini kelak bisa menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Namun, rencana ini terhenti karena berbagai kendala, termasuk ketidakstabilan politik dan fokus pemerintah yang teralihkan pada pembangunan Jakarta sebagai pusat administrasi dan ekonomi.

Pada era Presiden Suharto, pemindahan ibu kota kembali menjadi bahan diskusi, meskipun tidak pernah direalisasikan secara konkret. Pada tahun 1980-an, Suharto sempat mengkaji ide pemindahan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Jonggol dipilih karena lokasinya yang dekat dengan Jakarta namun dinilai lebih aman dari risiko banjir besar dan kepadatan penduduk. Kendati demikian, wacana ini tidak berlanjut karena berbagai alasan, termasuk tingginya biaya yang diperlukan untuk infrastruktur baru serta prioritas pembangunan lainnya. Pemindahan ibu kota pada masa Soeharto lebih banyak sebatas wacana dan kajian, tanpa ada langkah konkret seperti pembebasan lahan atau pembangunan awal.

Selanjutnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), wacana pemindahan ibu kota kembali muncul pada tahun 2010. Pemerintah saat itu mulai mengkaji Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang semakin tidak layak akibat kemacetan, banjir, dan penurunan muka tanah. SBY bahkan membentuk tim khusus untuk melakukan studi kelayakan terkait pemindahan ibu kota, dengan beberapa lokasi seperti Kalimantan dan Jonggol kembali menjadi kandidat utama. Namun, seperti pada era sebelumnya, rencana ini terhenti tanpa keputusan final karena berbagai tantangan, termasuk anggaran yang terbatas dan fokus pemerintah pada penyelesaian masalah infrastruktur di Jakarta. Pemindahan ibu kota akhirnya menjadi kenyataan pada era Presiden Joko Widodo dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru pada tahun 2019.

Sampai saat ini Ibu Kota Nusantara Indonesia (IKN) sudah diresmikan pada tanggal 11 Oktober 2024 oleh Presiden Joko Widodo, pemberitaan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus meluas dari berbagai isu hingga memunculkan kontroversi. Seperti halnya isu mengenai investor, perpres bahkan pemindahan ASN semakin ramai diperbincangkan masyarakat, jajaran pejabat maupun media.

Berbagai media online di Indonesia berlomba-lomba untuk memberikan informasi faktual yang akan dipublikasikan melalui situs berita online. Dari banyaknya media online yang memberitakan fenomena pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia, terdapat 2 media online yang cukup menarik dan memiliki pra-kontra yaitu Detik.com dan Tempo.co. Pemilihan portal berita tersebut bukan tanpa alasan, melainkan Contoh media *online* yang menjadi favorit masyarakat yaitu Detik.com dan Tempo.co. Dilansir dari Katadata.co.id, 10 media *online* yang paling banyak digunakan warga Indonesia di tahun 2024 didominasi 50% oleh Detik.com di urutan pertama dan di urutan 9 sebesar 15% ada Tempo.co. (Santika, 2024)



Gambar 1.1 Data 10 Media Online yang Paling Banyak Digunakan Warga Indonesia 2024 (*Source: Katadata.co.id*)

Dalam kasus pemindahan IKN, konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh media seperti Detik.com dan Tempo.co tidak hanya membentuk persepsi masyarakat, tetapi juga mencerminkan posisi dan kepentingan masing-masing media. Detik.com, misalnya, cenderung memberikan ruang lebih luas bagi pernyataan resmi pemerintah, menyoroti potensi ekonomi, dan narasi optimisme terkait pembangunan IKN. Di sisi lain, Tempo.co lebih sering menampilkan kritik terhadap kebijakan tersebut, memuat pendapat akademisi, aktivis lingkungan, serta

pihak-pihak yang mempertanyakan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat lokal serta lingkungan.

Perbedaan sudut pandang ini mencerminkan bagaimana media mbingkai suatu isu berdasarkan nilai-nilai redaksional, kepentingan pemilik media, serta segmen pembaca yang menjadi targetnya. Detik.com sering dianggap sebagai media yang mengutamakan kecepatan informasi dengan pendekatan berita langsung dan ringan, sementara Tempo.co dikenal sebagai media yang mengedepankan kedalaman analisis dan kritik tajam. Dalam kontroversi pemindahan IKN, framing berita di Detik.com cenderung menggunakan narasi progresif yang mendukung pemerintah dengan menyebutkan proyek ini sebagai solusi untuk mengatasi masalah urbanisasi dan distribusi pembangunan. Sebaliknya, Tempo.co lebih sering menggarisbawahi potensi risiko seperti ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat adat, dan alokasi anggaran yang dinilai kurang prioritas di tengah tantangan ekonomi.

Perbedaan cara konstruksi ini menunjukkan bagaimana media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Pemilihan narasumber, penyajian data, serta gaya penulisan menjadi alat framing yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami isu pemindahan IKN. Detik.com cenderung menonjolkan sisi teknis dan manfaat pembangunan, sementara Tempo.co mengangkat sisi kritis untuk mendorong diskusi publik yang lebih luas. Konstruksi yang beragam ini penting untuk menciptakan keseimbangan informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi pembaca untuk menyaring dan memahami berita secara objektif di tengah perbedaan perspektif media.

Melalui kapasitas dan kompetensi kedua media tersebut untuk menggiring opini publik bisa menjadi sebuah penentu. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam membuat pemberitaan, terkadang media tidak berdiri bebas dari kepentingan karena adanya seleksi atas isu yang diangkat baik yang akan ditonjolkan maupun dihilangkan. Oleh karena itu framing menjadi hal yang penting untuk dilakukan media online karena akan mempengaruhi khalayak untuk melakukan pemaknaan atas permasalahan yang diungkap. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut khususnya pada isu investor di IKN, peneliti ingin melakukan penelitian Konstruksi Media Online Terhadap Kontroversi Pemindahan Ibukota Negara (IKN) dengan menggunakan analisis framing Robert Entman pada media Detik.com dan Tempo.co

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keberpihakan media online **Detik.com** dan **Tempo.co** membingkai pemberitaan terkait kontroversi pemindahan Ibukota Negara (IKN)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis framing pemberitaan media online **Detik.com** dan **Tempo.co** terhadap kontroversi pemindahan Ibukota Negara (IKN).

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam kajian penelitian ini, peneliti menulis manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. **Manfaat Teoritis** : Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang studi media dan politik. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori dan praktik di masa depan.
- b. **Manfaat akademis** : Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa khususnya dibidang ilmu politik dan jurnalisme, misalnya sebagai bahan untuk tugas akhir atau penelitian lebih lanjut.
- c. **Manfaat Praktis** : Penelitian ini menyediakan alat evaluasi bagi praktisi media dan politik. Dengan mengidentifikasi framing yang dominan dalam pemberitaan isu politik, praktisi dapat mengukur sejauh mana pemberitaan tersebut objektif dan berimbang.
- d. **Manfaat Sosial** : Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi media masyarakat. Dengan mengetahui cara media membingkai isu politik, masyarakat dapat menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.